



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Wisnu Baroto**
2. Jabatan : **ANGGOTA DEWAN PENGAWAS**
3. NHK : **15876**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
2. Tanah Seluas 296 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
4. Tanah Seluas 462 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.285.000.000
1. MOBIL, FORTUNER TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
2. MOBIL, ALPHARD MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.560.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.715.778
F. HARTA LAINNYA	Rp.	250.000.000
Sub Total	Rp.	5.689.275.778



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.689.275.778

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.